

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan reformasi keuangan adalah terciptanya tata pemerintah yang baik, bersih dari korupsi, dan dapat diterapkannya sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Laporan keuangan daerah adalah dokumen yang berisi gambaran kondisi keuangan suatu pemerintahan daerah. Penyusunan laporan keuangan daerah melibatkan proses pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan secara transparan dan akurat. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan publik.

Laporan keuangan daerah merupakan instrumen pokok dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan laporan ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Selain itu, laporan keuangan daerah juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, membantu dalam pengambilan keputusan, serta mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan daerah yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah juga perlu melakukan proses audit untuk memastikan bahwa pada laporan yang disusun telah sesuai dan tidak terdapat kesalahan dalam penyajiannya. Audit laporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses yang krusial dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Proses audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara dan daerah. Audit laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan opini yang independen dan objektif mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia. Hasil audit ini kemudian dianalisis dan disampaikan dalam bentuk laporan yang mencakup opini auditor, temuan audit, dan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Analisis laporan audit keuangan daerah sangatlah penting mengingat peran yang strategis dari laporan tersebut dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Di Indonesia, laporan audit keuangan daerah menjadi instrumen utama untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik, serta untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada sektor publik di Indonesia, salah satunya pemerintah daerah seolah berlomba-lomba untuk memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya.

Dalam lima tahun terakhir, secara keseluruhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas laporan keuangan tersebut karena pemerintah daerah telah memperbaiki beberapa hal, salah satunya melakukan inventarisasi aset yang kemudian dicatat hasilnya (BPK.go.id, 2021). Menurut Agustinus Salle *et al* (2022) Pernyataan atau pendapat BPK merupakan pernyataan professional yang berisi kesimpulan hasil pemeriksaan atas tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit yang diberikan ada beberapa tingkatan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) serta Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Menurut UU No. 15 tahun 2004 yang membahas tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan, pendapat atau opini BPK diberikan berdasarkan pada keseuaian antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu juga dilihat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pengendalian Sistem Internal yang efektif. Ketiga kriteria pemeriksaan di atas akan mempengaruhi opini yang akan diterima oleh LKPD yang bersangkutan, semakin banyak jumlah temuan atau ketidaksamaan, maka opini yang diberikan oleh auditor akan buruk (kepri.BPK.id, 2017).

Contohnya seperti kasus pada kabupaten X yang dinyatakan terdapat temuan adanya kelemahan atas pengendalian internal pada bagian anggaran dan realisasi belanja modal pada belanja barang dan jasa, selain itu juga terdapat temuan adanya ketidaksuaian pekerjaan umum bina marga yang dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan belanja barang dan jasa dicatat lebih tinggi sedangkan realisasi belanjanya dicatat lebih rendah. Kondisi tersebut dikarenakan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan tim anggaran, serta adanya kelalaian yang dilakukan dinas pekerjaan umum bina marga dalam melakukan pengajuan belanja pemeliharaan jalan dan jembatan (Ramya Atyanta, 2012).

Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada situs web jatim.bpk.go.id, diketahui bahwa pada tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan tidak memberikan pendapat atau *disclamer* terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan adanya temuan BPK dimana terdapat penganggaran dan realisasi belanja sebesar 70 milyar lebih yang dinilai tidak tepat dan melanggar ketentuan (jatim.bpk.id, 2020).

Pada tahun 2020 diketahui juga bahwa BPK memberikan opini Tidak Wajar (TW) karena ada tujuh poin yang bersifat material yang menyebabkan LKPD Jember tidak disajikan secara wajar. Yakni tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020. Selain itu pada tahun 2021 pemkab jember memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (jatim.bpk.id, 2020).

Pada Tahun Anggaran 2022, banyak Pemerintah Daerah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satunya adalah pemerintah daerah kabupaten Jember yang juga mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaporkannya. Hal ini merupakan pertama kalinya sejak tahun 2017, sebab pada tahun berikutnya tingkat kualitas laporan keuangan daerah di kabupaten jember dinilai terus mengalami penurunan. Oleh karena itu tidak mudah untuk mendapatkan kembali opini wajar tanpa pengecualian bagi pemerintah Daerah kabupaten Jember setelah sebelumnya mendapatkan opini disclamer atau biasa disebut tidak bisa dinilai (jatim.bpk.id, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, maka bukan hal yang mudah bagi kabupaten Jember untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian setelah sebelumnya berada pada level disclaimer, inilah yang menjadi urgensi pada penelitian ini, yaitu terkait dengan bagaimana cara pemerintah Jember mengatasi hal tersebut hingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Oleh karena itu, studi kasus pada penelitian ini dilakukan di kabupaten Jember. Sebab kabupaten Jember baru memperoleh kembali opini WTP setelah 5 tahun lamanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul *“ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022 ”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun maka rumusan masalah yang dapat diteliti yaitu Bagaimana opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun anggaran 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Jember tahun anggaran 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memahami terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini oleh auditor, khususnya pada audit atas laporan keuangan daerah.

2. Manfaat Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hal-hal yang menyebabkan pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta membantu pihak-pihak yang

bertanggung jawab dalam bidang keuangan untuk terus memperbaiki dan mempertahankan kinerjanya.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang serupa.